



**BULETIN**

# PARLEMENTARIA

NOMOR 911/II/VI/2016



**DPR Kunjungi Gudang Bulog,  
Pastikan Ketersediaan Bahan Pokok**

**Pancasila Perlu Diusahakan Jadi  
Rajut Kain Tenun Indonesia**

**Paripurna DPR Sahkan  
Pilkada Jadi UU**

**GRATIS**  
Tidak Diperjualbelikan



*Pimpinan DPR dan Sejumlah Anggota DPR di Gudang Bulog*

## DPR Kunjungi Gudang Bulog, Pastikan Ketersediaan Bahan Pokok

Setelah melakukan operasi pasar di Pasar Cibitung dan Pasar Tambun Bekasi, Senin (6/6), Ketua DPR Ade Komarudin kembali berkunjung ke gudang Badan Urusan Logistik (Bulog) di Kelapa Gading, Jakarta, Selasa (7/6).

Untuk memastikan sejauh mana kesiapan Bulog menjalankan perannya terutama selama bulan Ramadhan dan menjelang Lebaran.

Dalam kunjungan tersebut, Pimpinan DPR yang didampingi Wakil Ketua DPR Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (KORINBANG) Agus Hermanto, Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron, Wakil Ketua Komisi IV DPR Viva Yoga Mauladi, serta Ketua Komisi VI DPR Teguh Juwarno.

Begitu tiba di lokasi, rombongan Pimpinan DPR disambut oleh Direktur Pengadaan Perum Bulog, Wahyu dan Direktur Komersial Perum Bulog, Fajri Sentosa.

"Kunjungan ke Bulog ini untuk meninjau kesiapan dalam menyambut Ramadhan. Saya juga ingin Bulog menjadi institusi yang kita percayai bersama untuk mengendalikan ketersediaan pasokan maupun harga dan kualitas dari sembako," kata pria yang

akrab disapa Akom.

Karena selama ini, menurut Akom, DPR RI menilai peran Bulog belum maksimal. Untuk itu, tambahnya, DPR meminta pemerintah memaksimalkan kembali peranan Bulog sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang melakukan kontrol terhadap kualitas pangan, harga dan ketersediaan kebutuhan bahan pokok dan diharapkan menjadi institusi pemerintah yang dapat menstabilkan harga kebutuhan pokok masyarakat, terutama menjelang Lebaran yang selalu terjadi kenaikan harga.

Akom pun menegaskan, seharusnya 40 persen pasar dikuasai oleh negara, karena hal tersebut penting supaya masyarakat tidak terombang-ambing oleh pelaku pasar yang kadang-kadang mencari keuntungan. Sementara konsumen, terutama di hari-hari besar seperti puasa dan lebaran, memerlukan harga yang terjangkau dengan kualitas yang baik.

"Jadi, Bulog harus menjadi institusi yang mampu memberikan stabilisasi kualitas harga maupun ketersediaan," tuturnya

Selanjutnya, Direktur Bulog, Wahyu, menerangkan, persediaan beras yang ada di Gudang Bulog 200 ribu ton untuk disalurkan ke seluruh wilayah Indonesia. Saat ini, sudah ada 135 ribu ton, dan akan ditambah terus dari daerah produsen, terutama dari Jawa Timur yang rencananya akan dikirim ke Jakarta sebanyak 40 ribu ton.

"Pasokan sampai lebaran aman. Harga jual turun, karena kita juga menggerakkan operasi pasar tidak kurang sekitar 170 ribu ton, dan dijual seharga Rp 7.900 per kilo,"ujarnya.

Untuk beras yang komersil juga dijual oleh Bulog dengan harga murah yakni 8.500 per kilo. Dan, penurunan harga beras pun bisa dicek ke Pasar Cipinang. Badan Pusat Statistik juga telah merilis penurunan harga beras. ■

## Pimpinan DPR Harapkan Bulog Jadi Institusi Penyangga Pangan Nasional

Di hari pertama Ramadhan, Ketua DPR RI Ade Komarudin didampingi Wakil Ketua DPR Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (KORINBANG) Agus Hermanto meninjau harga, kualitas, dan ketersediaan kebutuhan pangan di Pasar Induk Cibitung dan Pasar Tambun, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin (6/6).

**P**impinan DPR ini menghendaki Badan Urusan Logistik (Bulog) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi institusi penyangga pangan nasional.

Setelah peninjauan tersebut Pimpinan Dewan menyimpulkan kinerja pemerintah, baik Menteri Perdagangan, BUMN, dan Perindustrian khususnya Bulog belum maksimal, karena para pemangku kepentingan belum mampu menstabilkan harga. Ini mengakibatkan banyak masyarakat yang merasa kecewa. Selepas sidak ini, DPR akan dipimpin Wakil Ketua Agus Hermanto mengevaluasi langsung kinerja Bulog melalui Komisi VI DPR.

"DPR akan meninjau kesiapan Bulog kembali menjadi institusi yang kita percayai bersama untuk mengendalikan ketersediaan pasokan, harga dan kualitas sembako ini. Bulog sebagai institusi, diharapkan mampu menciptakan stabilitas harga ataupun ketersediaan," ujar Akom, sapaan akrab Ketua DPR.

Agus Hermanto menambahkan, seluruh lembaga pemerintah yang berwenang juga diharapkan mampu menciptakan ketahanan pangan nasional. "Tidak hanya institusi Bulog, peranan BUMN lainnya juga diharapkan dapat berperan dalam menyediakan ketersediaan pangan sehingga dapat menyangga ketahanan pangan nasional," imbuh Agus.

Akom mengatakan Bulog perlu



Ketua DPR Ade Komarudin didampingi Wakil Ketua DPR Agus Hermanto meninjau harga kebutuhan pangan di Pasar Induk Cibitung

dilakukan revitalisasi. Pimpinan DPR mendorong pengaktifan kembali Bulog menjadi institusi yang bisa memasok sembako dan mengendalikan harga pangan. Dia menginginkan 40 persen pasar harus dikuasai pemerintah guna menstabilkan harga.

"Sekurang-kurangnya 40 persen pasar harus dikuasai oleh Bulog, supaya masyarakat tidak terombang-ambing oleh para pelaku usaha pasar yang kadang-kadang mencari keuntungan. Sementara konsumen, terutama di hari-hari keagamaan besar seperti puasa dan lebaran, memerlukan harga yang terjangkau dengan kualitas yang baik," jelas Akom.

Dari hasil pantauan Pimpinan DPR, diketahui terjadi kenaikan harga kebutuhan pokok hingga mencapai 52 persen.

Beberapa kebutuhan pokok yang mengalami lonjakan cukup tinggi antara lain harga daging sapi, bawang, cabai, tomat serta harga jengkol.

Terkait harga daging, Ade Komarudin mengatakan, pihaknya pesimistis harga daging dapat ditekan hingga di kisaran Rp 85.000 per kilogram. Alasannya, masyarakat lebih memilih harga daging yang cukup

tinggi, sekitar Rp 120.000-130.000 per Kg ketimbang membeli daging yang dibanderol Rp 85.000 per Kg dengan kualitas kurang bagus. "Masyarakat lebih milih yang berkualitas, walau harga lebih tinggi," kata Akom.

Sembari melakukan sidak Akom menyempatkan memborong jengkol, cabai, melon, dan bawang merah. Lebih lanjut Agus Hermanto mengatakan, kenaikan harga di Pasar Induk Cibitung dan Pasar Tambun, mencapai 30 persen hingga 52 persen.

"Kita menginginkan institusi Bulog untuk berperan juga, menyediakan kebutuhan pokok lainnya, selain beras. Dan tidak hanya Bulog, ada perusahaan lainnya milik pemerintah yang juga diberi peran itu," harap Agus. ■

(eko.mp), foto: Rumi/br



**PENAWAS UMUM** Pimpinan DPR-RI **PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH** Dr. Winantuningtyas Titi Swasanany, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR-RI) **WAKIL KETUA PENGARAH** Dra. Damayanti, M.Si (DEPUTI PERSIDANGAN) **PIMPINAN REDAKSI** Drs. Suratna, M.Si (Kabag Media Cetak & Media Sosial) **WK. PIMPINAN REDAKSI** Dra. Tri Hastuti (Kasubag Media Cetak), Ahyar Tibi, S.H (Kasubag Media Analisis), Insan Abdirrohman, S.H, M.Si (Kasubag MedSos dan Website) **REDAKTUR** Mastur Prantono, Nita Juwita, S.Sos **SEKRETARIS REDAKSI** Suciati, S.Sos, Bagus Mudjiharjanto **ANGGOTA REDAKSI** Agung Sulistiono, SH, Rahayu Setiowati, Muhammad Husen, Sofyan Efendi, Virgianne Meiske Patuli, Devi Iriandi, Hendra Sunandar, Surahmat Eko, Ria Nur Mega **REDAKTUR FOTO** Eka Hindra, Iwan Armanias **FOTOGRAFER** Rizka Arianindya, Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah, Andi M.Ilham, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Jayadi Maulana, Arief Rachman, R. Kresno P.D Moempoeni, Azka Restu Fadilah **ADMINISTRASI FOTO** Hasri Mentari **ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA** Bagian Media Cetak & Media Sosial DPR RI Gedung Nusantara II Lt. 3 Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta Telp. (021) 5715348, 5715350 Fax. (021) 5715341, e-mail: dpr.pemberitaan@gmail.com, www.dpr.go.id/berita

**PIMPINAN PENERBITAN** Djujiawan Widjaya, S.Sos. M.AP (Kabag Penerbitan), **WK. PIMPINAN PENERBITAN** Mediantoro, SE (Kasubag Produksi), Pesta Evaria Simbolon, SE, M.Si (Kasubag Distribusi) **STAFF PRODUKSI** Eko Murdiyanto, Barliansyah **SIRKULASI** Abdul Kahfi, S.Kom, Siti Rondiyah, Oji **Telp.** 021-571 5697 **Fax.** 021-571 5421 **Email** penerbitandpr@gmail.com

**[ ISI BERITA DAN MATERI FOTO DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN ]**

## DPR Gelar Buka Puasa Bersama Wartawan

Untuk menjalin silaturahmi dengan wartawan, Pimpinan dan Sekretariat Jenderal DPR menyelenggarakan buka puasa bersama wartawan koordinatioriat DPR pada Selasa, (7/6) di Media Center, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

**D**alam acara ini hadir Ketua DPR Ade Komaruddin, Wakil Ketua Agus Hermanto dan Fahri Hamzah, Sekretaris Jenderal DPR Winantuningtyas Titi Swasanany serta Kepala Badan Keahlian DPR Johnson Rajagukguk.

"*Yaa ayyuhaalladziina amanuu kutiba 'alaykumu alshshiyaamu kamaa kutiba 'alaa alladziina min qablikum la'allakum tattaquun,*" papar Akom mengutip ayat Al-quran untuk mengingatkan kewajiban puasa di bulan Ramadhan.

Ketua DPR yang akrab dipanggil Akom menuturkan kebahagiaannya telah terselenggaranya acara buka puasa bersama wartawan yang dilakukan secara mendadak ini. "Saya bersyukur karena sore hari ini rencana dadakan untuk mengadakan buka puasa bersama wartawan bisa berjalan dengan baik," ujar legislator Dapil Jawa Barat VII ini.

Dalam paparan yang disampaikan sebelum buka puasa, Akom menyampaikan pesan takwa kepada hadirin. Menurutnya, wajib bagi umat islam untuk melakukan ibadah puasa di bulan Ramadhan sebagaimana dilakukan umat Nabi Muhammad SAW. "Bahwa wajib agar kita



*Pimpinan DPR dan Sekjen DPR berdiskusi dengan sejumlah Wartawan Koordinatioriat DPR sebelum buka puasa bersama di media centre*

melakukan ibadah puasa di bulan Ramadhan supaya kita bisa bertakwa dengan puasa ini," ujarnya.

Dalam acara yang dikemas serius tapi santai ini, Akom juga mengajak wartawan itu saling bekerjasama dalam menyampaikan kritik yang baik kepada DPR. Kritik itu dimaksudkan untuk memperbaiki keadaan DPR agar lebih baik. "Jadi silahkan wartawan kritisi DPR dengan baik, saya juga senang jika itu dimaksudkan agar DPR semakin baik," tuturnya.

Politisi Golkar ini juga menegaskan bahwa DPR akan terus berupaya meningkatkan kinerja legislasi DPR. Hal itu telah diupayakan dengan menambahnya jumlah RUU yang masuk dalam Prolegnas seperti diantaranya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, RUU Aparatur Sipil Negara, RUU Perkelapasawitan, R U U B a n k Indonesia dan RUU Otoritas Jasa Keuangan.

Akom juga menjelaskan bahwa dirinya selama 2 hari pertama di bulan Ramadhan sudah melakukan blusukan ke pasar Cibitung dan Tambun serta Bulog untuk memantau harga dan meninjau ketersediaan stok pangan. Hal ini sebagai upaya dari DPR untuk meningkatkan kerja pengawasan selama bulan Ramadhan.

Di akhir acara ini, Akom juga menegaskan bahwa Pimpinan dan Sekretariat Jenderal DPR akan terus menjaga hubungan baik dengan wartawan. "Pokoknya Pimpinan dan Sekjen DPR akan terus menjaga hubungan baik dengan wartawan," ujar alumni UIN Jakarta ini. ■

*(b.m.p.)/Foto: Kresnan/br*

## Pancasila Perlu Diusahakan Jadi Rajut Kain Tenun Indonesia

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengisi acara Diskusi Kebangsaan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (4/6).

**D**alam acara tersebut, Fadli Zon menjelaskan, setiap tanggal 1 Juni, kita memperingati Hari Lahir Pancasila. Berbagai upacara, pernyataan, disertai diskusi dan seminar, masih terus digelar. Para pejabat pemerintah dan para tokoh masyarakat masih mengutipnya.

Namun, banyak pihak juga kemudian menilai, sebenarnya secara substantif Pancasila sudah ditinggalkan, dilanggar, diselewengkan, dan bahkan dikhianati. Di era reformasi, Pancasila seolah telah menjadi monumen bisu.



*Wakil Ketua DPR Fadli Zon menjadi pembicara dalam acara Diskusi Kebangsaan Universitas Islam Negeri Walisongo di Semarang*

"Di tengah situasi dan kondisi yang kurang bagus saat ini, terutama di tengah ancaman konflik horisontal yang terus mengemuka, kita mestinya berusaha agar Pancasila bisa menjadi rajut bagi kain tenun Indonesia. Seperti kata Bung Hatta, Pancasila adalah pedoman menuju Indonesia yang berdaulat, bahagia, sejahtera dan damai." ujar Fadli Zon.

Kondisi salah arah yang menjebak kita saat ini, menurut Pimpinan DPR

Koordinator Polkam ini sebenarnya berawal dari pengabaian kita. Kita membiarkan jalan kehidupan berbangsa dan bernegara dipandu oleh kepentingan dan kebutuhan praktis, sehingga mengabaikan pedoman dan nilai-nilai dasar yang telah ditetapkan dalam Pancasila dan UUD 1945.

Itu sebabnya, Fadli Zon menekankan pentingnya untuk mendudukan Pancasila tidak hanya sebagai *living ideology*, tetapi

juga *working ideology*. Ideologi yang benar-benar dioperasionalkan dalam tataran praksis yang mampu menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebab memang Pancasila merupakan monumen gagasan paripurna para pendiri bangsa untuk mewujudkan kehidupan rakyat Indonesia yang lebih sejahtera. ■

(bmd,mp). Foto: Hamis/br

## Dubes Iran Temui Ketua DPR Bahas Kerjasama Dua Negara

Ketua DPR RI Ade Komarudin menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Republik Islam Iran, Valiollah Mohammadi. Dalam pertemuan ini membahas tentang rencana kerjasama Indonesia-Iran dalam bidang perdagangan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan.



Suasana pertemuan Pimpinan DPR dengan Dubes Iran

Akom, sapaan akrab Ketua DPR, menjelaskan, dua negara Indonesia-Iran memiliki satu kesamaan yakni sama-sama Republik yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Meskipun ada perbedaan mazhab tapi menurutnya, perbedaan ini tidak bisa menjadi halangan untuk saling mempererat dan memperkuat hubungan dan eksistensi masing-masing negara. "Dengan itu kita bisa merekatkan hubungan antara kedua negara," ungkap Akom di Gedung DPR, Nusantara III, Kamis (2/6).

Dalam pertemuan dengan Dubes Iran, hadir mendampingi Ketua DPR, Wakil

Ketua DPR Agus Hermanto, Ketua BKSAP Nurhayati Ali Assegaf, dan Anggota Dewan dari Komisi VI DPR, Mustofa Assegaf. Akom dan Dubes Iran sama-sama bersepakat bahwa parlemen memiliki peran penting dalam menjalin diplomasi antara kedua belah pihak.

Dubes Iran mengungkapkan meskipun mayoritas warga negara Iran bermazhab Islam Syiah namun di negaranya juga membebaskan penduduk untuk memilih keyakinan. Bahkan dia menceritakan, saat ini Iran baru saja menyelenggarakan pemilu secara demokratis, justru yang terpilih menjadi Ketua Dewan bermazhab Islam

Sunni.

"Ini merupakan pertama kali dalam sejarah, yang bermazhab Sunni terpilih menjadi Ketua Dewan di Republik Islam

Iran, ini penting untuk pengikut mazhab lain," ujar Valiollah menginformasikan kepada Akom.

Dubes Iran menawarkan hubungan kerjasama kepada Indonesia dalam sektor perdagangan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan. "Kami berharap ada perluasan hubungan antara dua negara melalui palemen. Tentu saja kami sangat melihat penting parlemen kedua negara.

Kami ingin ada dorongan potensi ekonomi perdagangan, ilmu, dan kebudayaan," harap Valiollah.

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto, juga menyambut baik tawaran tersebut. Karena selama ini hubungan ekonomi Indonesia-Iran masih kecil. Selain itu dia juga membuka opsi kemungkinan ada pertukaran pelajar antara kedua negara.

"Memang harus ditingkatkan terutama masalah ekonomi perdagangan yang masih sangat kecil. begitu pun kerjasama di bidang teknologi dan energi yang masih kecil. Untuk itu mari kita berniat kerjasama, bahkan pertukaran pelajar," papar Agus. ■

(eko). Foto: Arif/br

## PKI Tak Layak Hidup di Indonesia

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menjadi pembicara pada Simposium Nasional bertema "Mengamankan Pancasila dari Ancaman Kebangkitan Partai Komunis dan Ideologi Lain". Fadli menyampaikan pemikirannya bahwa PKI dan aliran komunisme tak layak hidup di Indonesia, dan negara dan masyarakat Indonesia perlu mewaspadaai kemunculan paham, komunisme.

“Komunisme di Indonesia tidak bisa diberikan tempat karena telah berkali-kali melakukan pemberontakan, Ingin mengganti Pancasila dan pemberontakan " katanya, di Jakarta, Kamis (2/6).

Fadli Zon membeberkan sejarah singkat perjalanan Partai Komunis Indonesia (PKI) di Tanah Air. Pada 1927, partai berlambang palu dan arit itu tidak sedang melakukan perjuangan kelas sebagaimana ciri komunisme. Sebaliknya, mereka justru memperjuangkan politik ras.

"Kalau teori komunisme itu perjuangan dan pertentangan kelas. Di Indonesia, ada sistem kolonial, yang kita hadapi pada masa Hindia-Belanda bukan *class struggle*, tapi *race struggle*. Karena strukturnya waktu itu, kolonial, Tionghoa, Timur jauh, lalu Bumiputera," ujar Fadli.

Pada proses kemerdekaan, Fadli memastikan PKI tidak berperan sama sekali. Sebaliknya, PKI justru menganggap proklamasi 1945 sebagai



Wakil Ketua DPR Fadli Zon

momen revolusi yang gagal.

"Pada proklamasi, tidak ada peran PKI. Karena itu mereka selalu kritik sebagai revolusi gagal," imbuhnya.

Selanjutnya, Fadli mengutarakan, dua kali pemberontakan itu peristiwa 1948 yang dipimpin Muso. PKI melakukan pemberontakan saat agresi militer Belanda ke II terjadi.

"Musu datang dari Soviet, Musu bikin pernyataan jalan baru bagi Indonesia,

mengancam Sukarno-Hatta. Saat agresi militer II ada pemberontakan tahun '48, jelas mereka pengkhianat bangsa. PKI nusuk dari belakang saat ingin perang lawan Belanda. Banyak orang lupa dikira mereka (PKI) ada peran dalam proklamasi dan berjuang melawan Belanda, nyatanya mereka mengkhianati bangsa tahun '48," jelas Fadli.

Kemudian pemberontakan kedua pada 1965. PKI disebut Fadli Zon berupaya menguasai pemerintahan dengan mencoba-coba meyakinkan Sukarno.

"Ini pola yang terus berulang, mereka mencoba menghapus sejarah. Peristiwa '65 itu pemberontakan, banyak yang bilang itu bukan pemberontakan. Di dalam rukun komunisme, ada revolusi. Jadi komunisme harus berontak dan melakukan upaya revolusi dengan membuat dewan revolusi. Saya melihat jelas PKI mau ambil alih kekuasaan dengan cara-cara yang tidak benar," tegas dia.

"Kalau bicara kekejaman komunis sudah banyak buktinya," paparnya. Fadli menegaskan, kini negara dan masyarakat Indonesia diminta waspada atas kemunculan paham komunisme. Negara harus waspada paham komunisme yang dapat meresahkan masyarakat. ■

(as), Foto: Hamzah/br

## Fahri Hamzah Dorong Penguatan Parpol

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menekankan pentingnya peran partai politik dalam demokrasi, sehingga mampu memperbaiki dirinya sendiri, agar tujuan demokrasi untuk mensejahterakan rakyat bisa tercapai. Dalam sistem politik di Indonesia, partai politik adalah medium untuk menyalurkan aspirasi rakyat. Sehingga jika partai politik gagal, maka sistem representasi yang ada juga gagal.

“Kalau kita tidak memperkuat parpol, maka akan muncul frustrasi dari rakyat yang memiliki pandangan berakhirnya otoritarianisme tidak membuat rakyat menjadi lebih baik, karena tidak ada demokrasi tanpa partai politik," ujar Fahri.

Hal itu disampaikan saat menjadi *keynote speaker* dalam *International*

*Conference and Congress on Political Science Development (ICCOPSD) bertema Democracy for People* di Hotel Pandanaran, Semarang, Kamis, (2/6).

Fahri juga menekankan jika frustrasi rakyat mengenai ketidakpercayaannya terhadap partai politik semakin menguat, maka itu sudah masuk dalam fase

kegagalan dalam berdemokrasi. "Nah kalau frustrasi ini berkembang dan rakyat memiliki pandangan bahwa partai politik tidak lagi penting, maka kita sudah memasuki fase kegagalan dalam demokrasi," sambungnya.

Ia juga berharap kepada ilmuwan politik untuk mampu menemukan rekomendasi



Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah

untuk dijadikan *warning* jika pemimpin partai politik gagal melakukan konsolidasi, maka akan berdampak pada gagalnya demokrasi secara keseluruhan. "Mudah-mudahan para ilmuan politik dapat menemukan rekomendasi yang memberikan *warning* kepada para pemimpin partai politik jika gagal mengkonsolidasikan partai politik maka bisa gagal total semua," jelasnya.

Legislator dapil Nusa Tenggara Barat ini juga menyoroti soal keuangan politik. Menurutnya, keuangan politik adalah sumber kehancuran moral partai politik. Sehingga dirinya menekankan agar petinggi partai politik tidak mencari uang untuk partai.

"Keuangan politik adalah sumber kehancuran moral partai politik. Seharusnya jangan suruh pejabat partai politik untuk cari uang. Selama pejabat partai politik disuruh cari uang karena sistem keuangan parpol yang tak teratur,

maka selamanya akan dituduh korup," tegasnya.

Selain itu, Fahri juga menekankan agar keuangan partai politik dikelola secara transparan sebagai salah satu mekanisme untuk memperkuat partai politik. "Atur pengelolaan keuangan supaya seluruh keuangan di partai itu ada mekanisme masuk dan keluar yang transparan," pungkask Fahri

Acara ICCOPSD ini, turut diikuti oleh akademisi dari kampus-kampus yang berasal dari Norwegia, Australia, Indonesia, Malaysia dan Vietnam. Di akhir acara ini, Fahri juga mengusulkan agar CEPP (*Center for Election and Political Party*), sebagaimana penyelenggara kegiatan ini untuk menyelenggarakan konferensi partai politik yang melibatkan semua parpol, peneliti dan akademisi agar menghasilkan rumusan untuk perbaikan partai politik di masa mendatang. ■

(bs.mpi), Foto: Hendra/br

## Rieke Apresiasi KPPU Hukum Kecurangan Kartel Daging Sapi

Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka, mengapresiasi kinerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang telah memberikan hukuman kepada 32 perusahaan penggemukan sapi yang berbuat curang.

“Kebetulan kami membaca berita tanggal 6 Juni 2016 bahwa KPPU telah memberi sanksi denda senilai 107 miliar terhadap 32 perusahaan penggemukan sapi yang terbukti melakukan kartel. Saya sangat mengapresiasi langkah yang dilakukan KPPU,” papar Rieke saat RDP di ruang sidang Komisi VI, Selasa (7/6).

Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini menilai gejolak harga daging sapi yang belakangan sedang meroket, dan beberapa harga sektor pangan yang tidak stabil, salah satu penyebabnya adalah karena adanya mafia kartel pangan yang berlaku curang. Pemberantasan mafia pangan, menurut Rieke adalah pekerjaan rumit.

"Ini tentu bukan pekerjaan yang mudah. karena mafia pangan itu ada di berbagai sektor pangan. Tidak hanya dalam persoalan daging sapi. Kami mendukung, saya Rieke Diah Pitaloka dari Fraksi PDI

Perjuangan bersama dengan kawan-kawan yang lain," jelasnya.

Dia juga menyatakan dukungan kepada KPPU selama melakukan langkah-langkah progresif untuk menghadapi kesiapan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dan mewujudkan kedaulatan pangan nasional. Menurut Rieke kedaulatan pangan nasional merupakan wujud kewibawaan negara. Termasuk dia juga menyokong KPPU dalam kebijakan politik anggaran.

"Akan mendukung KPPU kalau KPPU melakukan langkah-langkah yang progresif. Karena dalam menghadapi MEA serta mewujudkan kedaulatan pangan. Juga merupakan persoalan kedaulatan negara kita," ungkap Rieke.

Namun demikian, anggota Dewan dari dapil Jawa Barat VII ini meminta KPPU kerja keras yang lebih optimal lagi, bukan hanya persoalan daging sapi, tapi



Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka

juga bawang merah dan gula. Menurutnya dalam menghadapi masalah ketersediaan pangan dan harganya yang terjangkau belum ada koordinasi yang baik antara kementerian yang berwenang.

"Bagaimana stok masih banyak tapi masih terjadi impor. Rencananya akan diimpor dengan jumlah yang tidak sedikit, di mana bertentangan dengan pernyataan Menteri Pertanian sendiri, yang menyatakan stok gula masih cukup, malah berlebih. Kemudian Kementerian Perdagangan dan BUMN akan mengimpor *raw-sugar* untuk menjaga stok gula," ungkapnya prihatin. ■

(eko.mpi), Foto: Arief/br

## Sekjen DPR Hadiri Penyerahan LHP Atas LKPP Tahun 2015

Sekjen DPR RI Winantuningtyas Titi Swasanany menghadiri acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan aset pemerintah di Kementerian dan Lembaga tahun 2015, oleh BPK kepada Presiden, di Istana Negara, Jakarta.

“LHP atas LKPP tahun 2015 semakin bagus, akuntabel dan semakin transparan,” ujar Winantuningtyas Titi, di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (6/6).

LKPP merupakan bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan APBN oleh Pemerintah Pusat. Pertanggung-jawaban pelaksanaan APBN berupa LKPP tersebut sebelum menjadi UU harus diperiksa oleh BPK.

“LHP dan LKPP tahun 2015 terdiri dari tiga laporan utama, yaitu LHP atas laporan keuangan yang berisi opini BPK atas LKPP tahun 2015, LHP atas Sistem Pengendalian Intern (SPI), dan LHP atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan,” tutur Ketua BPK Harry Azhar

Azis dalam pidato sambutannya.

Untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK juga melengkapi laporan-laporan utama tersebut dengan laporan tambahan berupa Laporan Hasil Reviu atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal tahun 2015, dan Laporan Pemantauan Tindak Lanjut atas hasil pemeriksaan LKPP tahun 2007-2014. Dan atas LKPP tahun 2015 tersebut, BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

“Pemantauan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan LKPP tahun 2007-2014 mengungkapkan 81 temuan dengan rekomendasi sebanyak 218. Rekomendasi temuan pemeriksaan yang sudah ditindak



Sekjen DPR RI Winantuningtyas Titi Swasanany

lanjuti sebanyak 61 rekomendasi, sedangkan yang masih dalam proses tindak lanjut sebanyak 157 rekomendasi,” ungkapnya. ■

(dep.mp), Foto: jakathr

## Baleg dan Menkes Bahas RUU Kekarantinaan Kesehatan

Posisi Indonesia sebagai negara kepulauan dengan sekitar 17.504 pulau yang terdiri dari pulau besar atau kecil memiliki posisi sangat strategis karena berada pada jalur lalu lintas perdagangan internasional.

Banyaknya pintu masuk ke wilayah Indonesia memperbesar risiko penyebaran penyakit menular dan gangguan kesehatan.

Demikian mengemuka dalam Rapat Kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR bersama Menteri Kesehatan Nila Farid Moeloek di Gedung DPR RI, Senayan, Kamis (02/06).

“DPR memandang regulasi dibidang kekarantinaan kesehatan ini cukup penting dan mendesak. Jangan sampai kita terlambat dalam merespon penularan penyakit lewat bandara, pelabuhan, batas wilayah maupun negara,” ucap Wakil Ketua Baleg Dossy Iskandar Prasetyo

usai memimpin Rapat Kerja dengan Menteri Kesehatan.

Politisi dari Fraksi Hanura itu menambahkan, ia tidak ingin kejadian seperti di Korea saat wabah Mers (*Middle East Respiratory Syndrome*) mewabah sehingga menimbulkan banyak korban jiwa. “Ini sangat riskan, kita tidak ingin kejadian serupa terjadi karena 1 orang menimbulkan dampak yang luar biasa,” tambahnya.

Saat ini, Dossy mengatakan, performa karantina kesehatan sangat

memprihatinkan meskipun sudah memiliki *instrument* hukum yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara. Namun, kedua regulasi tersebut sudah tidak cukup komprehensif menjawab persoalan kekinian terutama yang berbasis IT (*Information Technology*).

Hal senada disampaikan, Menteri Kesehatan Nila Farid Moeloek, UU tersebut sudah tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini. Menurutnya,



Pimpinan Baleg DPR berdialog dengan Menteri Kesehatan

perkembangan transportasi darat, laut maupun udara sejalan dengan kemajuan teknologi dan perekonomian memicu pergerakan serta perpindahan orang dan barang antara negara maupun antar wilayah. Pergerakan tersebut secara tidak langsung berdampak pada

penyebaran penyakit sehingga penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan perlu dilakukan secara komprehensif, terintegrasi dalam rangka cegah tangkal.

"Diharapkan pembaharuan Undang-Undang Keekarantinaan Kesehatan menjadi landasan hukum yang cukup kuat untuk melakukan penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan secara terpadu dan sistematis," tutur Nila. ■

(amr.mp), Foto: Jayadi/hr

## CSR Perlu Diatur Agar Tak Sekedar Bansos

Anggota Komisi VIII DPR RI, Amrullah Amri Tuasikal menyampaikan bahwa pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dirasa perlu ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga perusahaan pelaksana CSR memiliki pegangan dan tepat sasaran.

“Pelaksanaan CSR perlu diatur sehingga tidak hanya sekedar bantuan sosial, tapi mampu memandirikan masyarakat,” kata politisi Partai Gerindra ini, Selasa (7/6), di Gedung DPR RI Senayan Jakarta.

Tuasikal juga menjelaskan, banyak masukan dari berbagai kalangan, khususnya para akademisi, agar Indonesia sebaiknya punya definisi CSR sendiri menyesuaikan dengan konteks permasalahan di Indonesia.

Sejauh ini, CSR yang diadopsi perusahaan Indonesia

menggunakan *Community Involvement and Development* yakni kebijakan perusahaan untuk kegiatan sosial.

Lebih lanjut menurut Tuasikal, pemerintah dirasa perlu untuk membuat aturan yang jelas sebagai acuan untuk perusahaan dalam melaksanakan CSR. CSR dilakukan untuk memenuhi biaya pemberdayaan masyarakat, untuk itu diperlukan *social mapping* yang melibatkan Pemerintah daerah.

"CSR itu perlu aturan yang jelas, dibuat *road map* sehingga program ini dibuat untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan harus ada laporan. Selain itu dibuat payung program yang memayungi program-program CSR, sehingga semua program terarah serta ditekankan harus memakai data kemiskinan," tambahnya.

Politisi dari Dapil Maluku ini, mencontohkan di daerahnya belum terlihat jelas pelaksanaan CSR padahal mestinya CSR perusahaan perikanan yang ada dapat memprioritaskan programnya untuk pengembangan kapasitas masyarakat pesisir di sektor perikanan dan kelautan.

"Jika yang dilakukan melalui CSR itu disesuaikan dengan kebutuhan dan karakter masyarakatnya maka upaya

pengentasan kemiskinan pun dapat berjalan. Pengentasan orang miskin selama ini keliru, karena orang miskin dibantu menjadi tidak mandiri," kilahnya.

Sebagai catatan, pelaksanaan CSR di Indonesia masih berbeda-beda mulai dari definisi, tanggungjawab dan tujuannya. Saat itu terdapat sekitar 35 PP di daerah yang mengatur tentang CSR dan lingkungan, sayangnya tidak selalu meningkatkan efektifitas CSR.

Seharusnya program CSR tidak hanya memberikan manfaat kepada masyarakat tetapi juga kepada perusahaan pelaksana CSR itu. Beberapa isu kritis yang mengemuka adalah bentuk jelas dari CSR antara lain yang berkaitan dengan sasaran program CSR, dan pihak yang disebut masyarakat dinilai hanya berdasarkan letak geografis. Padahal seharusnya mampu mendorong pembangunan yang tidak tumpang tindih dan CSR tidak memberi beban baru kepada perusahaan.

"Saya melihat sejumlah perusahaan di daerah yang program CSRnya tidak terkoordinasi dengan baik, ini terjadi karena aturan yang kurang mengikat. Selain itu, program CSR perusahaan yang sudah berjalan sejauh ini tidak membangun kualitas SDMnya, sehingga masyarakat tetap sulit mempertahankan kehidupan", jelas Tuasikal.

Dirinya berharap agar pelaksanaan program CSR tidak bertentangan dengan keinginan masyarakat, melainkan dapat meningkatkan upaya pemberdayaan masyarakat. ■

(as), Foto: Team Armanida/fw



Anggota Komisi VIII DPR Amrullah Amri Tuasikal

# Paripurna DPR Sahkan RUU Pilkada Jadi UU

Sidang Paripurna DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (KOREKKU) Taufik Kurniawan mengesahkan RUU tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-undang.

“Apakah RUU ini dapat disetujui menjadi undang-undang?” tanya Taufik Kurniawan di Sidang Paripurna DPR, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/6), yang disambut koor "setuju" para anggota Dewan yang hadir dalam Sidang tersebut.

Sebelumnya, Ketua Komisi II Rambe Kamarulzaman mengatakan dalam pengambilan keputusan tingkat pertama, semua fraksi dan pemerintah telah menyetujui untuk membawa RUU tersebut ke dalam pembahasan tingkat II. Walaupun demikian, masih ada beberapa catatan yang telah disampaikan, terkait persoalan syarat dukungan pasangan calon dan syarat mundur atau tidaknya anggota DPR, DPD, dan DPRD yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah.



Ketua Komisi II Rambe Kamarulzaman dan Pimpinan DPR

"Pada dasarnya, semua fraksi dengan argumen hukumnya menginginkan bahwa anggota DPR, DPD, dan DPRD tidak perlu mengundurkan diri. Namun, dalam proses pembahasan panjang secara maraton, hanya dua fraksi, yaitu PKS dan Gerindra, yang masih memberi catatan mengenai syarat dukungan ini," ujar politisi

F-PG dapil Sumut II tersebut.

Anggota DPR Almuzammil Yusuf dari F- PKS, menyampaikan interupsi dalam Paripurna, bahwa PKS tetap menginginkan agar anggota DPR, DPD dan DPRD tak perlu mundur saat maju dalam Pilkada. Fraksi PKS lebih setuju apabila, baik petahana dan anggota dewan cukup mengambil cuti selama masa Pilkada. Demikian juga dengan Anggota Fraksi Gerindra Azikin Solthan yang menyatakan pandangan sama.

Taufik Kurniawan, selaku Pimpinan Sidang mengatakan bahwa masukan yang disampaikan oleh PKS dan Gerindra akan dijadikan catatan dalam proses pengesahan UU kali ini.

"Tentunya atas seizin kami dari meja pimpinan, tidak ada menang dan kalah, dan harapan setiap interupsi dicatat sebagai dokumen yang tak terpisahkan," tuturnya. ■

(depmp), Foto: Negarajitra



Suasana rapat kerja Komisi XI DPR dengan Kementerian Keuangan beserta sejumlah jajarannya

## Komisi XI Pertanyakan Program Pengampunan Pajak

Program pengampunan pajak yang jadi bantalan dalam RAPBN-P 2016 dipertanyakan Komisi XI DPR RI. Pemerintah dinilai terlalu yakin dengan proyeksi penerimaan dari uang tebusan pengampunan pajak tersebut, sementara Komisi XI sendiri sedang membahas RUU Pengampunan Pajak.

## Komisi I Kritik Program LPP RRI

Banyak kritik yang ditujukan Komisi I DPR RI kepada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) atas program siarannya. Komisi yang membidang penyiaran ini menginginkan LPP RRI mampu memberikan informasi yang diinginkan pendengar melalui program yang dikemas menarik sehingga menjadi radio utama berita oleh pendengarnya.

Anggota Komisi I Evita Nursanty mengkritik program siaran RRI yang seharusnya mampu bersaing dengan radio berita lainnya, sehingga menjadi lembaga berita utama yang didengar dan digemari pendengar masyarakat Indonesia.

"Carilah keistimewaan tema program siaran yang mampu menarik perhatian pendengar, karena yang kita perlukan berita peristiwa yang disiarkan mempunyai manfaatnya pendengar. Buatlah kegiatan yang interaktif dengan masyarakat, sehingga banyak minat untuk bertanya, maka pada gilirannya banyak yang mendengar. Perbanyak acara dialog interaktif maka animo pendengar akan makin banyak," katanya dalam RDP Komisi I dengan Dirut LPP RRI dan Dewan Pengawas LPP RRI, Senin (6/6), di Gedung DPR, Jakarta.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini juga mengutarakan bahwa TVRI dan RRI bersinergi dalam melakukan siaran, sehingga kedua lembaga penyiaran publik berplat merah ini lebih

maksimal dalam memberikan informasi peristiwa Nusantara.

"Jika kedua lembaga penyiaran seperti RRI dan TVRI saling bekerjasama dan bersinergi dapat menghasilkan program siaran nasional yang luar biasa," katanya.

Dalam Rapat RDP yang dipimpin Wakil Ketua Komisi I TB. Hasanuddin, tersebut terkait pembahasan pendahuluan penyusunan RKA/P-KL LPP RRI TA 2017 dan Pembahasan Usulan APBN-P LPP RRI TA 2016. TB menyampaikan bahwa LPP RRI pada tahun 2016 mendapat pagu anggaran sebesar Rp.864 Milyar. Digunakan untuk dua program yaitu program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lain LPP RRI sebesar Rp.673 M.

Sementara program pengelolaan dan penyelenggaraan siaran radio publik sebesar Rp.191 M.

LPP RRI telah mengajukan usulan

kebutuhan tambahan anggaran tahun 2016 sebesar Rp.377 Milyar, juga mengusulkan TA 2017 sebesar Rp.1,012 T termasuk dukungan manajemen Rp.877,6 M &

pengelolaan pelaksanaan siaran Rp.135,5 M). ■

(es), Foto: Rizka/br



Anggota Komisi I Evita Nursanty

Kritik dilontarkan bergantian dari para anggota Komisi XI saat rapat kerja dengan Menteri Keuangan, Gubernur BI, Menteri PPN, dan Kepala BPS, Senin (6/6). Kritik pertama kali dilontarkan Melchias Marcus Mekeng (F-PG). Menurutnya, berbahaya bila pemerintah sudah langsung memasukkan target penerimaan pajak dari pengampunan pajak dalam RAPBN-P 2016. Bila proyeksi tersebut meleset dipastikan akan merombak semua target penerimaan.

"Ini kan masih ekspektasi pemerintah. Apakah pemerintah sudah punya nama-nama pasti yang akan

memasukkan pajaknya?" tanyanya kepada Menkeu Bambang Brodjonegoro. Nilai targetnya yang cukup besar tentu menjadi pertanyaan semua pihak. Seperti diketahui, pemerintah sendiri sudah menargetkan penerimaan Rp 180 triliun dari pengampunan pajak. Namun, pemerintah mengambil langkah moderat dengan menargetkan Rp 165 triliun dalam RAPBN-P 2016.

Sarmuji Anggota Komisi XI lainnya juga mempertanyakan keyakinan pemerintah yang mampu menggaet pajak dari program pengampunan pajak sebagai bantalan RAPBN-P 2016. "Ketika DPR masih

diantara yakin dan tidak yakin dengan *tax amnesty*, pemerintah malah sudah yakin dan memasukkannya ke RAPBN-P," ucapnya dalam rapat tersebut.

Ditambahkan pula oleh Anggota F-Nasdem Johnny G Plate, soal program pengampunan pajak ini, pemerintah harus memberi penjelasan yang lebih komprehensif kepada DPR. Penjelasan pemerintah sangat penting, karena ingin memasukkannya dalam materi penerimaan RAPBN-P 2016. ■

(mb), Foto: Arief/br

# BPK Berikan Opini Wajar Dengan Pengecualian Atas LKPP Tahun 2015

Atas LKPP Tahun 2015, BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Opini tersebut sama dengan opini Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2014. Hal ini disampaikan Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis, saat Rapat Paripurna DPR di Gedung Nusantara 1, Jakarta, Kamis (02/06).

Harry menerangkan, ada enam permasalahan yang ditemukan BPK dalam pemeriksaan LKPP tahun 2015 yang menjadi pengecualian atas kewajaran LKPP. Permasalahan tersebut merupakan gabungan ketidaksesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kelemahan sistem pengendalian intern, dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Salah satu permasalahannya menurut Harry adalah pemerintah menetapkan harga jual eceran minyak solar bersubsidi lebih tinggi dari harga dasar termasuk pajak dikurangi subsidi tetap sehingga membebani konsumen dan menambah keuntungan badan usaha melebihi dari yang seharusnya sebesar Rp 3,91 triliun.

Selanjutnya, tambah Harry, koreksi-koreksi pemerintah yang mengurangi nilai ekuitas sebesar Rp 96,53 triliun dan transaksi antara entitas sebesar Rp 53,34 triliun, tidak dapat dijelaskan dan tidak didukung dokumen sumber yang memadai.

mengambil langkah-langkah perbaikan agar ke depan permasalahan yang mempengaruhi kewajaran laporan keuangan menjadi semakin berkurang dan tidak menjadi temuan berulang," ujar.

Secara keseluruhan, tandas Harry, dari pemeriksaan atas 86 entitas pelapor, BPK mengapresiasi Pemerintah khususnya Kementerian Keuangan dan jajarannya yang telah berupaya untuk menjaga kualitas laporan keuangan yang ditunjukkan tidak signifikannya penurunan kualitas laporan keuangan pada penerapan pertama kali Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis aktual.

"Hal tersebut terlihat dari jumlah KL yang memperoleh opini WTP hanya menurun sebanyak 6 KL dari 62 KL pada tahun 2014 menjadi 56 KL pada tahun 2015. Sedangkan KL yang memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP) pada tahun 2015 masing-masing sebanyak 26 KL dan 4 KL," katanya.

Dalam pemeriksaan LKPP tahun 2015, BPK melakukan reviu atas pelaksanaan transparansi fiskal. Hasil reviu secara keseluruhan menunjukkan pemerintah telah memenuhi sebagian besar kriteria transparansi fiskal secara memadai. "Kami berharap DPR RI dapat membantu tindak lanjut LHP LKPP oleh pemerintah sehingga tidak ada masalah yang sama pada tahun berikutnya dan kualitas LKPP dapat terus ditingkatkan oleh pemerintah," tuturnya. ■



Pimpinan DPR menerima laporan BPK terkait LKPP Tahun 2015

Kemudian, selanjutnya, pencatatan dan penyajian catatan dan fisik Saldo Anggaran Lebih (SAL) tidak akurat sehingga kewajaran transaksi dan/atau saldo terkait SAL sebesar Rp 6,60 triliun tidak dapat diyakini.

Terhadap permasalahan tersebut, pemerintah perlu

## Legislator Protes Anggaran Daerah Dipotong

Terkait usulan pemerintah yang menurunkan anggaran transfer ke daerah, Hetifah, Anggota Bangkar DPR RI menyampaikan keberatannya. Menurutnya, dana transfer ke daerah adalah perwujudan pembangunan yang didasarkan pada konsep Nawa Cita butir ketiga.

“Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan,” ujarnya saat Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan RI, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Hukum dan HAM serta Gubernur Bank Indonesia pada Senin, (6/6) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

Ia menegaskan bahwa dana transfer ke

daerah yang dikurangi tidak sesuai dengan butir Nawa Cita. "Jika dana transfer ke daerah dikurangi, ini tidak sesuai dengan butir ketiga Nawa Cita," sambungnya.

Pada APBN 2016, alokasi dana transfer daerah dan dana desa mengalami kenaikan yang cukup besar. Hal tersebut membuat Pemerintah Daerah optimis untuk pembangunan daerah. Tetapi dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi saat



Anggota Banggar DPR Hetifah Syaifudin

ini, Pemerintah berencana menurunkan alokasi dana tersebut. Menurut Hetifah, jika transfer ke daerah dikurangi akan banyak pembangunan yang tertunda.

"Penurunan dana transfer ke daerah

akan menimbulkan risiko yaitu pembatalan dieksekusinya rencana kebutuhan daerah terutama terkait proyek fisik dan infrastruktur, sehingga mempengaruhi fiskal di daerah," ujar Hetifah

Oleh karena itu Politisi Golkar tersebut meminta agar dana transfer daerah tidak diturunkan. "Saya dari Dapil Kaltim-Kaltara, daerah yang merupakan penghasil dan pengolah minyak dan gas. Kami ingin agar dana transfer daerah jangan diturunkan. Kami juga mendesak untuk dilakukan revisi atas UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah agar memberi keuntungan bagi daerah", tegas Hetifah.

Sebagaimana diketahui, dalam RAPBN-P 2016 usulan pemerintah, dana

transfer ke daerah mengalami penurunan. Dalam ABPN 2016, alokasi dana transfer ke daerah sebesar Rp. 723,2 triliun, turun menjadi Rp. 711,3 triliun pada RAPBN-P 2016. Secara keseluruhan dana transfer ke daerah mengalami penurunan sebesar Rp. 11,9 triliun.

Dana bagi hasil (DBH) misalnya diturunkan sebesar Rp. 4,7 triliun. Dalam APBN 2016 alokasi DBH sebesar Rp. 106,1 triliun, turun menjadi Rp. 101,5 triliun di RAPBNP 2016. Demikian pula dengan dana transfer khusus yang turun Rp. 8,3 triliun, dari sebelumnya Rp. 208,9 triliun menjadi Rp. 200,7 triliun. Sementara itu dana Otomoni khusus (Otsus) dan Keistimewaan seperti Papua, Papua Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengalami kenaikan Rp. 1,1 triliun. ■

(b.m.p), Foto: Andri/br

## Penurunan Kesenjangan, Prioritas Pembangunan Nasional 2017

Pemerintah melalui Menteri Keuangan RI, Bambang Brodjonegoro memberikan jawaban terhadap pandangan fraksi-fraksi DPR RI tentang Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun Anggaran 2017. Tanggapan pemerintah ini disampaikan saat Sidang Paripurna Kamis (2/6) yang dipimpin Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan.

Setiap pandangan fraksi mengenai berbagai isu tentang ekonomi makro dan kebijakan fiskal diberikan jawaban oleh Menkeu dengan penjelasan yang cukup padat. Bambang menjelaskan akan melaksanakan secara maksimal amanat DPR, terkait upaya perbaikan di bidang kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kualitas dan kuantitas ketenagakerjaan.

"Pemerintah menyadari bahwa isu kesenjangan di Indonesia saat ini perlu mendapat perhatian khusus. Penurunan kesenjangan ini menjadi salah satu prioritas dan sasaran pembangunan nasional pada tahun 2017," jelas Bambang di hadapan Sidang Paripurna DPR, di Gedung Nusantara II.

Dia mengungkapkan, penurunan



Pimpinan DPR menerima dokumen dari Menteri Keuangan

kesenjangan secara tegas diamanatkan dalam Nawacita ketiga dengan membangun dari pinggiran serta memperkuat daerah dan desa. Bambang melanjutkan, pembangunan infrastruktur konektivitas, peningkatan peran daerah dalam pembangunan, dan berbagai bantuan

sosial diharapkan dapat mempercepat pengurangan kesenjangan kesejahteraan masyarakat.

Terkait dengan ketenagakerjaan, pemerintah berkomitmen akan lebih banyak menyerap tenaga kerja dibandingkan dengan sektor perkebunan dan pertambangan. Bambang juga mengatakan, pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas dan keahlian tenaga kerja, antara lain melalui berbagai pelatihan dan integrasi informasi pasar kerja.

"Kerjasama kebijakan di bidang pendidikan, ketenagakerjaan dan dunia usaha juga semakin ditingkatkan untuk menyelaraskan keahlian dan kebutuhan di pasar tenaga kerja," ujar Bambang.

Menkeu juga menyampaikan apresiasi atas pandangan besar fraksi terkait perlunya mewaspadai dinamika ekonomi di tengah ketidakpastian ekonomi global. Mengenai asumsi pertumbuhan ekonomi, menurut Bambang, pertumbuhan ekonomi tahun 2017 diperkirakan berada pada kisaran 5,3 sampai 5,9 persen cukup realistis.

"Dari sisi eksternal, perkiraan membaiknya kinerja ekonomi global terutama negara-negara mitra dagang utama Indonesia tahun 2017 diharapkan dapat membantu perbaikan kinerja perekonomian nasional," papar Bambang. ■

(r.m.m.p), Foto: Jeyadi/br

## Michael Wattimena Apresiasi Standar Keselamatan dan Keamanan Karoseri Laksana

Wakil Ketua Komisi V DPR Michael Wattimena mengapresiasi standar keselamatan dan keamanan yang diterapkan PT. Laksana Karoseri dalam proses perakitan Bus Rapid Transit (BRT) yang dipesan oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

**H**al tersebut diungkapkan usai dirinya bersama Tim Kunjungan Spesifik Komisi V DPR meninjau langsung proses perakitan bus di PT. Laksana Karoseri Ungaran, Semarang, baru-baru ini.

"Kami sudah melihat langsung dari proses pembuatan rangka bus hingga *finishing body* dan terlihat kualitas pekerjaan karoseri PT. Laksana sangat mumpuni dan memenuhi standar keselamatan dan keamanan, juga proses pengerjaan itu betul-betul sesuai dengan spesifikasi yang dikehendaki," puji Michael.

Dirinya menambahkan bahwa kedatangan Tim Komisi V DPR yang terpenting adalah menjalankan fungsi pengawasan, bagaimana melihat sarana dan prasarana yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan yang ditunjuk oleh Kemenhub untuk mengerjakan proyek perakitan BRT ini.

Politisi Demokrat ini menjelaskan bahwa Tahun 2015 Kemenhub sudah memesan 1.000 unit Bus Besar BRT yang



Wakil Ketua Komisi V DPR Michael Wattimena saat meninjau PT. Laksana Karoseri di Semarang

akan digunakan tersebar di 33 provinsi seluruh Indonesia. BRT menjadi bagian dari program pengadaan 3.000 unit bus pada tahun 2015-2019 oleh Kemenhub yang berasal dari dana APBN hasil dari pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur, salah satunya adalah infrastruktur transportasi.

Dari 1.000 bus yang dipesan Kemenhub untuk tahun 2015, proses produksinya dilaksanakan oleh 7 perusahaan karoseri, antara lain Karoseri Laksana 350 bus,

Karoseri Rahayu Sentosa 200 bus, Karoseri Tentrem 150 bus, Karoseri New Armada 100 bus, Karoseri Trisakti 100 bus, Karoseri Restu Ibu Pusaka 50 bus, dan Karoseri Piala Mas 50 bus.

Sementara itu, terkait biaya pengiriman bus yang tidak masuk dalam perjanjian kontrak dengan perusahaan karoseri, Michael berjanji akan membahasnya dalam rapat dengan Kemenhub.

"Soal tanggung jawab biaya pengiriman bus (*delivery*) yang saat ini masih ditanggung oleh pihak penerima, dalam hal ini Pemda, Pemkot, Pemkab atau instansi masing-masing, tentu akan membebani apalagi jika jaraknya jauh sehingga butuh biaya tinggi," ungkap Michael.

Politisi Dapil Papua Barat ini berharap nantinya biaya pengiriman bus ini bisa dijadikan satu paket dengan proyek perakitannya, sehingga ditanggung oleh APBN atau APBD, namun hal tersebut perlu dibicarakan dengan pihak Kemenhub terkait ketersediaan anggaran.

Sementara pada APBN TA 2016 ini Direktorat Bina Sistem Transportasi Perkotaan Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub rencananya akan mengalokasikan anggaran untuk pengadaan 183 unit bus besar BRT dan 630 unit bus sedang BRT dengan total anggaran mencapai Rp. 697 miliar. ■

(opt). Foto: Nengfuroji/br

## Sepuluh RUU Masuk Prolegnas 2016

Rapat Kerja Badan Legislasi DPR dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menyetujui Perubahan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2015-2019. Sebanyak 10 RUU yang masuk ke dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016, diantaranya satu RUU masuk Prolegnas RUU Tahun 2015-2019.

“Rapat Kerja Baleg DPR dan Kemenkumham menyetujui untuk menyepakati 10 RUU masuk dalam Prolegnas Prioritas tahun 2016,” ucap Wakil Ketua Baleg DPR Firman Soebagyo saat memimpin Rapat Kerja Baleg di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (6/6).

Politisi dari Fraksi Golkar tersebut mengatakan kesepuluh RUU tersebut memiliki urgensi untuk dimasukkan ke dalam prioritas pembahasan tahun sidang 2016.

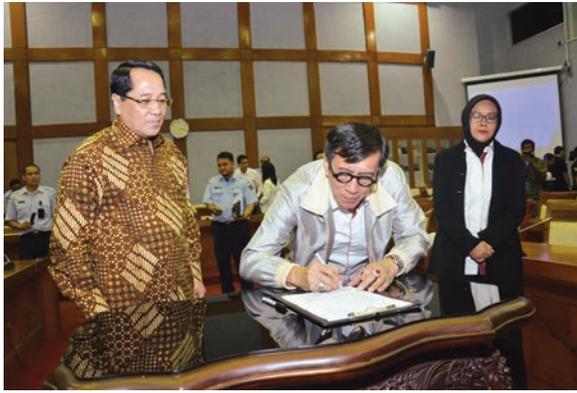
Adapun, 10 Rancangan Undang-Undang yang disepakati terdiri dari usulan DPR dan Pemerintah. 5 RUU merupakan

usulan inisiatif DPR yaitu RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, RUU tentang Perkelapasawitan, RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan RUU tentang

Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Sedangkan 5 RUU lainnya merupakan usulan pemerintah adalah RUU tentang Bea Materai, RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, RUU tentang Narkotika dan Psicotropika dan RUU tentang Kepalangmerahan.

Politisi asal dapil Jawa Tengah III itu menjelaskan, penambahan 10 RUU pada perubahan Prolegnas 2016 dengan pertimbangan, lima RUU sudah disetujui



Wakil Ketua Baleg DPR Firman Soebagyo dan Menkumham menandatangani 10 RUU Prioritas Tahun 2016

menjadi UU serta tujuh RUU lainnya akan segera disetujui menjadi UU.

"Sesuai aturan dalam Tatib DPR, dalam Prolegnas tahunan ada 40 RUU karena lima RUU sudah selesai dan dalam waktu dekat ini ada beberapa UU lagi yang

sudah *on-going*, itu juga sudah hampir selesai, sehingga tidak masalah jika memasukkan RUU baru" jelasnya.

Sebagaimana diketahui, DPR telah menyetujui 5 RUU menjadi Undang-Undang, yakni: RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat, RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam, RUU tentang Penyandang Disabilitas, RUU tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun

2015 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. ■

(amr.np), foto: jayadi/br

## Laju Pertumbuhan Ekonomi Masih Bisa Digenjot

Badan Anggaran DPR RI akan bergerak cepat membahas RAPBN 2017 dan secara simultan akan membahas revisi UU APBN 2016 dalam bentuk APBN-Perubahan 2016.

Sebab hingga saat ini, masih ada sejumlah perbedaan asumsi dalam RAPBN 2017 antara sebagian fraksi di DPR dengan pemerintah.

"Sebagian kalangan DPR menilai, laju pertumbuhan ekonomi minimal 5,1 persen sudah ada di tangan. Kita tinggal menggenjotnya menjadi 5,3 persen agar target laju pertumbuhan ekonomi bisa tercapai," kata Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Kamis (2/6).

Hal itu disampaikan usai memimpin rapat paripurna DPR dengan agenda Jawaban Pemerintah Terhadap Pandangan Fraksi-fraksi DPR RI Tentang Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun Anggaran 2017. Adapun angka pasti dari hasil pembahasan itu, lanjutnya, akan disampaikan presiden dalam nota keuangan APBN 2017.

Politisi F-PAN itu juga mengapresiasi sikap pemerintah yang telah merespon pandangan dan masukan seluruh fraksi di DPR. Adapun bagaimana tindak lanjut dan



Menteri Keuangan saat menyampaikan laporan di depan Sidang Paripurna DPR RI

dinamisasi serta pembahasannya, akan diserahkan kepada masing-masing fraksi di Banggar.

"Pemerintah tidak dalam posisi menolak atau menerima, akan tetapi melakukan matrikulasi dan kodifikasi hal-hal mana yang sejalan dengan pendapat pemerintah. Sehingga seluruh pandangan fraksi telah direspon oleh pemerintah," ujarnya.

Dikatakan, sikap pemerintah nantinya akan terlihat pada saat pendalaman dan dinamisasi pembahasan bersama dengan

Banggar. Taufik menambahkan, angka tersebut tentu akan sangat tergantung pada pembahasan.

"Perkembangan di masing-masing fraksi tentu akan berbeda. Meski demikian, secara keseluruhan positif dan masih ada poin-poin yang bisa diefektifkan. Selain itu, ada pula poin-poin yang bisa dilakukan penghematan. Tentunya, hal itu disesuaikan dengan prioritas pemerintah," tandasnya.

Politisi asal dapil Jawa Tengah itu mengatakan, fraksi-fraksi di DPR tentunya menginginkan adanya efektivitas dan efisiensi anggaran yang tepat sasaran. Sebab, penggunaan anggaran tepat sasaran dan bisa mendukung Program

Nawacita yang digagas oleh pemerintah.

"Bila penggunaan anggaran efektif, tentu akan sinkron dengan program pemerintah. Sentralisasi penggunaan anggaran juga harus bisa menyentuh pada kebutuhan masyarakat," tegasnya.

Dia kembali menegaskan, program pro rakyat harus menjadi prioritas. Tantangan globalisasi hanya bisa diatasi dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. "Sebab, kemiskinan hanya membuat ketidakseimbangan, ketidakadilan dan ketidakstabilan politik," tukasnya. ■

(9), Foto: Anadi/br

## Legislator: Menristekdikti Seperti Patah Arang jika Impor Rektor

Anggota Komisi X DPR RI Dadang Rusdiana menilai Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) seperti patah arang jika jadi mengimpor rektor dari luar negeri, untuk memimpin Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Pasalnya, Indonesia masih memiliki sumber daya manusia yang kompeten untuk memimpin PTN.

“Menristekdikti terlihat seperti patah arang. SDM kita mampu, tinggal bagaimana dukungan dari sisi anggaran dan keseriusan Pemerintah. Lebih baik polanya kerjasama antar PTN dalam negeri dengan luar negeri, bukan mengimpor rektor,” tegas Dadang di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (7/6).

Menurut politisi F-Hanura itu, seharusnya Pemerintah memiliki keyakinan bahwa Indonesia memiliki kemandirian untuk mengembangkan dan mengelola SDM penting di NKRI. Ia menilai, tidak pada tempatnya, jika kita membeli SDM asing untuk menjadi rektor di PTN. Apalagi tujuannya semata hanya untuk kepentingan meningkatkan derajat daya saing PTN agar masuk dalam daftar perguruan tinggi berkelas dunia.



Anggota Komisi X Dadang Rusdiana

"Ketika kita lebih mempercayakan kepada orang asing untuk memimpin PTN, dimana disitu dicetak generasi yang akan melanjutkan bangsa ini kedepan, tentu ini ada problem budaya dan karakter. Kita tidak percaya pada kemampuan kita sendiri, bermental inlander. Kita harus punya keyakinan, bahwa kualitas SDM kita tidak kalah dibandingkan SDM negara lain, jika kita belajar," tegas Dadang.

Politisi asal dapil Jawa Barat itu menganalisa, untuk membuat PTN agar mempunyai daya saing, letak persoalannya bukan di penempatan rektor asing. Tapi seharusnya anggaran untuk pendidikan tinggi dioptimalkan, sehingga PTN memiliki infrastruktur yang memadai. Kemudian, perlu dibangun sebuah sistem pembelajaran yang lebih inovatif.

"Para dosen didorong untuk melaksanakan penelitian, kemudian Kemenristekdikti menjamin bahwa birokrasi penelitian lebih sederhana, sehingga dosen lebih tertarik untuk melakukan penelitian," tegas Dadang. ■

(9/), Foto: Azka.or

## Harga BBM Lebih Mahal, Pertamina Harus Bertanggungjawab

PT Pertamina (Persero) diminta mempertanggungjawabkan kebijakannya menjual bahan bakar minyak bersubsidi dan nonsubsidi lebih mahal dari harga normal. "Pertamina harus menjelaskan kepada publik kemana hasil penjualan BBM yang mahal itu. Jika tidak bisa mempertanggungjawabkannya, berarti Pertamina merampok hak rakyat."

Demikian pernyataan tegas Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo Soekartono dalam rilis yang diterima Parlemen, Selasa (7/6). Pertamina tidak hanya menjual BBM nonsubsidi lebih mahal dari harga seharusnya, tetapi juga menjual BBM subsidi lebih mahal dari BBM nonsubsidi. Ini menjadi temuan yang sangat ironis.

Bambang mengungkapkan, Pertamina telah membanderol solar subsidi Rp 5.150 per liter, sementara solar nonsubsidi (industri) hanya dijual Rp 4.500 per liter oleh PT Patra Niaga, anak perusahaan Pertamina. Politisi dari Partai

Gerindra ini membandingkan, BUMN itu juga telah menjual bensin lebih mahal daripada negara lain.

Dijelaskan Bambang, harga RON 90 (setara pertalite), misalnya, di Malaysia hanya 1,2 ringgit atau Rp 3.892 per liter, sementara harga pertalite di Indonesia Rp 7.100 per liter. Demikian juga dengan Pertamina Plus (RON 95), Pertamina menjual seharga Rp 8.450 per liter, sedangkan Petronas Malaysia menjualnya 1,7 ringgit atau Rp 5.514 per liter.

Menurut Bambang, Pertamina mengambil keuntungan terlalu besar dari selisih harga jual tersebut, apalagi dari selisih harga BBM subsidi dan nonsubsidi.

Dengan asumsi subsidi solar Rp 1.000 per liter dan harga solar industri Rp 4.500 per liter, maka terdapat selisih Rp 1.650 per liter yang masuk kantong Pertamina. Apabila konsumsi normal solar sekitar 30.000 kiloliter per hari, berarti uang subsidi solar yang disedot Pertamina mencapai Rp 49,5 miliar per hari atau Rp17,8 triliun per tahun.

Politisi dari dapil Jatim I itu juga prihatin karena dalam kondisi seperti ini, pemerintah justru berencana memangkas bahkan menghapus subsidi solar. Dalam rancangan Perubahan APBN 2016 kepada DPR RI, pemerintah memangkas subsidi BBM dan LPG sebesar Rp 23,1 triliun

menjadi Rp 40,6 triliun.

Rencana ini disebut sejalan dengan upaya penghematan melalui kebijakan subsidi tetap solar Rp 350 per liter mulai 1 Juli 2016. Bambang menilai pemerintah tidak berempati kepada rakyat yang sudah berkorban menggunakan kendaraan pribadi dan membayar BBM dengan harga mahal akibat transportasi publik dan infrastruktur yang masih buruk.

"BBM untuk kendaraan pribadi saja masih perlu disubsidi, apalagi untuk

transportasi publik dan logistik. Kalau BBM murah, tarif logistik pasti murah, biaya produksi industri berkurang, dan harga barang turun, sehingga daya beli rakyat meningkat. Dampaknya, ekonomi akan tumbuh lebih tinggi," jelasnya. ■



Anggota Komisi VI DPR Bambang Haryo Soekartono

## Komisi VI Keberatan Pemotongan Anggaran KPPU

Komisi VI DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi VI, Azam Azman Natawijana menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Selasa, (7/6).

Komisi VI memberikan perhatian khusus pada pemotongan anggaran KPPU oleh pemerintah, serta mempertanyakan realisasi penyerapan anggaran KPPU pada tahun 2016.

Beberapa Anggota Komisi VI merasa keberatan dengan pemotongan anggaran di KPPU. Pasalnya menurut penilaian Anggota Komisi VI kinerja KPPU sudah terlihat, dan saat ini perlu ditingkatkan. Terlebih lagi untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), pengawasan lembaga ini dalam memantau persaingan usaha yang sesuai aturan dan sehat perlu progresifitas.

Pemerintah mengeluarkan kebijakan penghematan, dengan memotong anggaran pada tahun 2016 sebagai hasil tindak lanjut pelaksanaan Inpres No.4 tahun 2016. "Kendala apa yang dihadapi KPPU dengan adanya pemotongan anggaran tersebut," tanya Azam kepada pejabat KPPU di ruang sidang Komisi VI, Gedung Nusantara I.

Ketua KPPU, Muhammad Syarkawi Rauf menjelaskan, setelah dilakukan penghematan, dengan memperhitungkan

adanya realisasi sampai dengan 31 Mei 2016, belanja operasional dan belanja honorarium, maka sisa anggaran KPPU adalah Rp. 17.849.089.181,-

Menurut Syarkawi, perhitungan penghematan tersebut seharusnya tidak memasukkan besaran belanja operasional



Wakil Ketua Komisi VI Azam Azman Natawijana

dan belanja honorarium. Sehingga angka penghematan untuk KPPU tidak sebesar Rp. 27.008.644.700,-

Sebagaimana komitmen KPPU untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan penegakan hukum dan upaya menjaga iklim persaingan usaha yang sehat di bidang pangan dan usaha kecil menengah. "Maka alokasi anggaran setelah penghematan tidak dapat menunjang

pelaksanaan kegiatan penegakan hukum, khususnya pemberantasan kartel pangan yang menjadi tugas utama KPPU saat ini," keluh Syarkawi.

Sementara itu Anggota Komisi VI dari F Gerindra Sumail Abdullah mengatakan, "Anggaran di bawah satu triliun tak perlu ada pemotongan. Kalau yang di atas itu, baru ditinjau kembali," ungkapnya.

Selain itu Pimpinan Sidang Azam meminta penjelasan tentang realisasi penyerapan anggaran di KPPU. "Mohon diberikan penjelasan mengenai realisasi penyerapan anggaran sampai dengan Mei 2016, berdasarkan program dan kegiatan unit kerja eselon I KPPU," ujar Azam.

Ketua KPPU, Muhammad Syarkawi Rauf memaparkan, berdasarkan pagu indikatif dan rancangan awal rencana kerja pemerintah tahun 2016, KPPU mendapat anggaran sebesar Rp. 116.460.861.000,-. Proses pembahasan anggaran ini telah dilakukan melalui pertemuan trilateral meeting antara KPPU dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan pada April 2015.

Tak ketinggalan Anggota Komisi VI dari dapil Jawa Timur I Bambang Haryo Soekartono mengatakan, ada banyak permasalahan persaingan usaha yang harus di-protect oleh KPPU. Terlebih pemotongan anggaran berkaitan dengan kegiatan investigasi di KPPU. "Saya dukung untuk mendapat anggaran yang cukup," ungkapnya. ■

# RUU TJSP Diharapkan Jadi Momentum Strategis Wujudkan Kesejahteraan

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) atau Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai RUU Inisiatif dari DPR RI diharapkan menjadi momentum strategis untuk mewujudkan kesejahteraan.

**H**al ini diungkapkan Wakil Ketua Komisi VIII DPR Deding Ishak saat memimpin pertemuan Tim Panja RUU TJSP Komisi VIII DPR RI dengan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur yang diwakili Asisten Kesejahteraan Rakyat (Asisten III) Bere Ali, DPRD Pemprov Kaltim, DPRD Kota Bontang, Pemkot Balikpapan, PT Badak LNG, PT Pupuk Kaltim, dan PT Indominco Mandiri, di Guest House Provinsi Kaltim, Kamis (2/6/2016).

Untuk itu, kata Deding, diperlukan koordinasi yang sinergis antara pemerintah, pemda, perusahaan, dan masyarakat. Dalam hal ini, sambungnya, pemerintah dan pemda dapat berperan sebagai regulator dan pengawas yang mampu mengkoordinasikan dan mensinergikan penyelenggaraan tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan agar bermanfaat bagi masyarakat secara optimal dan dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional.

Menurutnya, pengaturan TJSP dalam sebuah undang-undang akan memberikan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan TJSP. Ketentuan ini, lanjutnya, dimaksudkan untuk mendukung terjadinya hubungan perusahaan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

"Dalam peraturan mengenai TJSP terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai TJSP. Namun, pengaturannya masih menimbulkan multitafsir dalam memaknai TJSP. Selain itu, perbedaan pemahaman dalam memaknai TJSP juga menyebabkan perbedaan pelaksanaan TJSP," ungkapnya.

Oleh karena itu dibutuhkan pengaturan secara khusus dalam undang-undang tersendiri secara komprehensif yang akan mengatur semua kegiatan TJSP seperti BUMN, BUMD, Swasta (nasional atau asing) di Indonesia sebagai landasan hukum

yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan TJSP.

Aturan mengenai kriteria dan skala perusahaan yang melaksanakan TJSP apakah perlu, dan bagaimana bentuk TJSP yang telah dilaksanakan oleh perusahaan.

Menanggapi hal tersebut, Hermansyah dari PT Badak LNG Bontang mengatakan, perlu adanya aturan mengenai kriteria dan skala perusahaan, terutama perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam, karena eksplorasi sumber daya alam berdampak kepada kehidupan komunitas setempat. Namun, sambungnya, hendaknya perusahaan yang tidak bergerak di bidang sumber daya alam turut juga melaksanakan program TJSP/CSR sebagaimana mestinya.

Terkait dengan bentuk TJSP, Hermansyah menjelaskan bahwa bentuk TJSP yang dilakukan oleh PT Badak LNG terbagi dalam empat pilar sesuai dengan Permen LH No.35 Tahun 2004 tentang Proper. Pertama, *community empowerment* yaitu pengembangan masyarakat untuk mewujudkan kemandirian masyarakat.

Kedua, *capacity building* yaitu



Wakil Ketua Komisi VIII DPR Deding Ishak

peningkatan kapasitas pengetahuan dan ketrampilan baik formal dan non formal. Ketiga, *charity* yaitu program bantuan untuk memenuhi masyarakat sekitar kilang. Keempat, infrastruktur yaitu program bantuan untuk mendukung sarana dan prasarana umum yang bersifat mendesak dan pioner.

Menurut Hermansyah, yang diharapkan perusahaan dalam menyelenggarakan TJSP adalah hubungan harmonis dan mutualisme antara perusahaan dengan masyarakat sekitar operasional dan pemda. Terwujudnya kemandirian dan peningkatan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat sekitar operasional perusahaan. ■

(tw), Foto: Team/hr

## Sambut Ramadhan, Nasir Djamil Silaturahmi dengan Wartawan

Menyambut Ramadhan 1437 Hijriyah, Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil bersilaturahmi dengan para wartawan yang tergabung dalam Wartawan Koordinatoriat DPR RI, di Media Center DPR, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (3/6).

**K**unjungannya ke Media Center merupakan yang pertama kalinya sejak direnovasi.

"Saya belum pernah masuk ke press-room baru, jadi kaget juga karena sudah bagus sekali dan merepresentasikan bahwa memang ini ruang wartawan," ungkap Nasir usai bersilaturahmi.

Selain itu, Politisi dari Fraksi PKS itu juga mengapresiasi Media Center DPR yang baru. Menurutnya, ruang kerja wartawan DPR yang baru sudah memenuhi standar dan nyaman sehingga para wartawan bisa maksimal dalam bekerja.

"Saya lihat seluruh ruangan mantap, luar biasa dan nyaman. *Smoking area* juga sudah

# Darizal Basir Minta Komisi I Panggil Kemlu dan PJTKI

Terkait vonis mati atas Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Ponorogo, Rita Krisnawati oleh pengadilan Malaysia, anggota Komisi I DPR RI, Darizal Basir, akan meminta Komisinya untuk memanggil Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dan perusahaan penyalur jasa TKI (PJTKI) yang bersangkutan.

“Selain mendapatkan informasi yang lebih jelas, tujuan pemanggilan kepada Kemlu ini adalah untuk mencari solusi agar Rita bisa bebas dari hukuman gantung” kata Darizal dalam Release yang diterima Parlemen Kamis (2/6).

Dalam pemanggilan nanti, Darizal berharap Kemlu tidak hanya menjelaskan kasus Rita ini saja, tetapi juga kasus-kasus WNI dan TKI lainnya yang juga tengah menanti atau sudah divonis mati, jumlahnya mencapai 200-an.

Vonis mati dengan cara hukuman gantung terhadap Rita dijatuhkan dalam pengadilan yang digelar Mahkamah Tinggi Penang, Malaysia, pada 30 Mei 2016. Rita didakwa atas penyelundupan narkoba jenis sabu seberat 4kg.

Politisi Partai Demokrat ini menjelaskan kronologi bagaimana Rita ini bisa terjebak dalam jaringan narkoba internasional. Rita bukanlah TKI yang bekerja di Malaysia. Ia bekerja di Hongkong sejak Januari 2013 melalui PJTKI PT Putra Indo Sejahtera, Madiun. Belum genap tiga bulan bekerja, Rita

ada tempatnya, dan bagi perokok pasif sekarang sudah bisa bekerja tanpa harus kena asap rokok,” ungkap Nasir.

Dalam kesempatan tersebut, selain bersilahturahim, Nasir juga menggelar makan bersama dengan para wartawan Media Center DPR.

Nasir memastikan selama bulan Ramadhan, kegiatan anggota dewan akan tetap berjalan seperti biasanya. Mengingat masih banyak target DPR yang harus dicapai selama masa sidang ke-V ini.

Politisi dapil Aceh I ini juga berharap selama Ramadhan parlemen mengurangi kegaduhan politik. “Harapan kita karena ini memasuki Ramadhan terutama menjelang Idul Fitri, ada baiknya DPR mengurangi kegaduhan-kegaduhan yang bisa mengurangi



Anggota Komisi I DPR Darizal Basir

menerima PHK sepihak dari majikannya. Ia kemudian dikembalikan ke agensi di Hong Kong pada April 2013. Oleh agen yang menempatkan, Rita dikirim ke Macau untuk menunggu pekerjaan baru dan visa. Karena tidak ada kejelasan, tiga bulan kemudian Rita memutuskan untuk pulang kampung.

“Nah, sewaktu mau pulang itu, Rita ditawarkan bisnis jual beli pakaian oleh kawannya. Dia dibelikan tiket dengan rute

nilai-nilai ibadah puasa. Artinya, meminimalisir hal-hal yang berpotensi menimbulkan ketegangan, kemudian muncul kubu-kubu,” harapnya. ■



Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil

transit di New Delhi dan Penang. Saat di New Delhi, Rita dikasih sebuah koper yang katanya akan diambil oleh seseorang di Penang, Malaysia. Rita dilarang membuka koper tersebut. Sesampainya di bandara Penang, Rita ditahan oleh petugas bandara karena kedapatan membawa 4 kg dalam koper tersebut.”

“Rita ini dijebak. Dia korban jaringan peredaran narkoba internasional” terang purnawirawan TNI ini. “Dia dimanfaatkan karena keluguan, kepolosan dan keterdesakan ekonomi. Pola-pola seperti ini lazim digunakan dalam jaringan perdagangan narkoba internasional” ujar Darizal lagi.

Tentang upaya Kemlu yang langsung mengajukan banding, Darizal memberikan apresiasinya.

Menurutnya, upaya Kemlu itu merupakan wujud nyata perlindungan dan kepedulian negara terhadap WNI di luar negeri. “Kita apresiasi itu”, tegasnya.

Politisi asal Sumbar ini menjelaskan bahwa pada dasarnya kita menghormati kedaulatan hukum Malaysia. Selain Indonesia, Malaysia juga merupakan salah satu negara yang memberikan ancaman pidana mati bagi para penyelundup narkoba. Tetapi Darizal menyayangkan majelis hakim Malaysia yang tidak mengangkat fakta-fakta yang ada ke persidangan. Bukti-bukti tersebut diantaranya adalah bahwa Rita tidak tahu terkait isi tas yang dibawanya serta adanya orang lain yang terlibat yang tidak pernah dihadirkan dalam persidangan.

“Nah, tugas Kemlu dalam banding nanti adalah bagaimana meyakinkan pengadilan Malaysia untuk melihat fakta-fakta lain yang ada sehingga Rita bisa lolos dari hukuman mati,” tuturnya.

Selain Kemlu, Darizal juga akan meminta Komisi I DPR RI memanggil PT Putra Indo Sejahtera selaku PJTKI yang mengirimkan Rita ke Hongkong. “Kita akan meminta pertanggungjawaban PJTKI tersebut mengapa Rita tidak mendapatkan pekerjaan selama berbulan-bulan di Hongkong”, pungkasnya. ■

# CSR Harus Berkontribusi Pada Pengentasan Kemiskinan

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Sodik Mudjahid (F-Gerindra) menegaskan, kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, harus berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan di daerah. Hal itu pula yang mendorong Komisi VIII DPR yang saat ini menyusun RUU Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) dapat bermanfaat untuk masyarakat.

“ CSR itu harus berkontribusi bagi pengentasan kemiskinan. CSR yang sudah dilakukan oleh PT

Petrokimia Gresik ini, sangat bermanfaat. Ini menjadi bukti bahwa kita juga harus



Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Sodik Mudjahid

hidup masyarakat sekitar perusahaan. Pasalnya, tambah Sarah-panggilan akrab Rahayu, banyak perusahaan dan industri di wilayah Indonesia, namun masyarakat disekitarnya terlihat miskin.

"Spirit yang kami tangkap dari RUU ini bahwa kita melihat banyak sekali wilayah Indonesia yang memiliki industri atau perusahaannya, tapi desa di sekitarnya seringkali miskin. Bahkan ada *powerplan* di daerah tersebut, tapi sekitarnya malah sering mati listrik," nilai politisi F-Gerindra itu.

Untuk itu ia berharap, UU yang dalam tahap penyusunan oleh Komisi VIII DPR ini, dapat mendorong perusahaan yang kurang tanggap terhadap lingkungan dan mengabaikan CSR, dapat meningkatkan kepeduliannya.

"Jangan sampai UU yang niatnya baik ini, malah disalahgunakan, atau dilihat kurang efektif dan menghambat

apa yang menjadi harapan sebenarnya. Ayo bersama-sama meningkatkan kepedulian," imbuh Sarah.

Politisi asal dapil Jawa Tengah ini juga berharap, dalam RUU ini nantinya juga dibahas persentase CSR perusahaan berupa pembangunan sarana dan prasarana untuk kaum disabilitas. Menurutnya, yang dibutuhkan kaum disabilitas adalah pendidikan yang adil, pekerjaan yang mereka dapat berkontribusi, dan sarana prasarana.

"Jika mereka (disabilitas, RED) diberikan keterampilan dan pendidikan, mereka mau berkontribusi. Kami ingin supaya CSR ini *holistic approach*-nya ke fungsi sebenarnya, bukan ke humas, untuk pencitraan," kata Sarah.

Kunjungan spesifik ini juga diikuti oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR Abdul Malik Haramain (F-PKB), Anggota Komisi VIII DPR, meliputi Desy Ratnasari (F-PAN), Tri Murny (F-Nasdem), Zulfadhli (F-PG), dan Muhammad Yudi Kotouky (F-PKS). ■

(f), Foto: Sofyan/br

membuat UU yang berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan," kata Sodik, saat menggelar pertemuan dengan direksi PT Petrokimia Gresik, di Gresik, Jawa Timur, Jumat (3/6).

Politisi asal daerah pemilihan Jawa Barat itu juga mengingatkan, fungsi dari CSR itu bukan untuk menghindarkan perusahaan dari pungutan-pungutan liar, tapi harus terarah kepada pengentasan kemiskinan.

"CSR itu juga harus membangun *competitiveness* dan produktifitas. CSR itu bagian dari penilaian kinerja yang dihubungkan dengan kegiatan sosial, sehingga ada *reward* dan *punishment*," imbuh Sodik.

Sementara itu, Anggota Komisi VIII DPR Rahayu Saraswati Dhirakarya Djojohadikusumo mengatakan, CSR yang selama ini dilakukan oleh perusahaan, yang nantinya akan diatur dalam UU TJSP, diharapkan dapat meningkatkan taraf

## Temui Dirjen ERIA, Nurhayati Bahas Peran Parlemen

Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) Nurhayati Ali Assegaf menerima kunjungan Deputy Director General, Administration and Personel Departemen, Kyota Yamamoto. Peneliti ini berasal dari Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA).

Dalam pertemuan ini Ketua BKSAP dan Peneliti dari ERIA membahas tentang pentingnya peran parlemen dalam Sustainable Development Goals (SDGs). Karena Indonesia menjadi percontohan untuk parlemen-parlemen dunia.

RI pernah diminta untuk mempresentasikan tentang peran parlemen di hadapan Forum PBB, yang saat itu disampaikan oleh Nurhayati. "Sehingga di SDGs ini Sekjen PBB mengatakan pentingnya peran parlemen dalam SDGs ini, karena fungsi parlemen dalam pembuatan undang-undang, anggaran

# RUU Kebidanan Untuk Lindungi Kerja Bidan

Kerja para bidan terutama di daerah terpencil kerap belum mendapat kepastian hukum, insentif, dan bahkan tumpang tindih wilayah kerjanya dengan dokter spesialis anak. Untuk itu, Komisi IX dan pemerintah sedang merancang UU yang bisa melindungi kerja para bidan.

Demikian terungkap dalam diskusi Forum Legislasi yang membahas RUU Kebidanan dengan menghadirkan pembicara Anggota Komisi IX DPR Irma Suryani Chaniago, Ketua Ikatan Bidan Indonesia Emy Nurjasmi, dan mantan Ketua Ikatan Dokter Indonesia Kartono Muhammad. Menurut Irma, RUU ini tidak saja memberi perlindungan, tapi juga memberi sanksi bila terjadi malapraktik.

Dijelaskan Irma, banyak persoalan kekinian yang melingkupi profesi bidan. Dari mulai sertifikasi, sekolah kebidanan, batasan kerja yang bisa dilakukan bidan, hingga kesejahteraannya. Jumlah bidan, lanjut Irma, sudah terlalu banyak, namun belum semua bersertifikasi. Politisi Partai Nasdem ini juga mengkritik pemerintah lewat Dikti yang mudah mengeluarkan izin sekolah kebidanan. Semua hal ini kelak akan diatur dalam RUU Kebidanan yang sedang dibahas.

Persoalan bidan di daerah tidak



Anggota DPR RI Komisi IX Irma Damayanti saat diskusi Forum Legislasi RUU Kebidanan

sederhana. Masyarakat di pelosok daerah malah lebih percaya pada bidan daripada dokter bila ingin berobat. Apalagi di daerah yang sama sekali tidak ada dokter. Bidan kadang terpaksa mengambil tindakan medik sampai mengeluarkan resep yang sesungguhnya dilarang oleh UU. Fakta ini menjadi perhatian serius Komisi IX dan pemerintah. RUU yang menjadi inisiatif DPR ini sebenarnya sudah sejak 2003 digulirkan.

Dikatakan Irma, butuh tiga kali masa sidang untuk menyelesaikan RUU ini. Semua organisasi profesi terkait, sudah diundang ke Komisi IX untuk memberi masukan. Emy Nurjasmi juga mengakui bahwa 87% ibu hamil di desa pergi ke bidan untuk mendapat layanan kesehatan. Untuk itu, perlu bidan yang kompeten dan

bertanggung jawab untuk melayani masyarakat. Bidan butuh kenyamanan, keamanan, dan status yang jelas. Dan RUU Kebidanan harus merumuskan semua ini.

Menurut Emy, wilayah kerja bidan adalah sejak masa kehamilan sampai bayi tersebut berusia 5 tahun. Jadi ada dua nyawa yang menjadi tanggung jawab bidan, ibu hamil dan anaknya. Generasi sehat dan cerdas ada di tangan para bidan. Pada bagian lain, Emy juga melihat, bidan butuh pendidikan lanjutan untuk mengembangkan karir dan keilmuannya. Tapi bidan di desa masih kesulitan mendapat akses pendidikan yang lebih tinggi. Ini perlu pengaturannya.

Sementara Kartono Muhammad mengimbau agar kompetensi bidan ditangani oleh organisasi profesinya, dalam hal ini IBI. Dan IBI sendiri harus mendapat pengakuan dari UU Kebidanan agar bisa bertindak legal seperti IDI yang juga diakui oleh UU Praktik Kedokteran. Soal tindakan medik yang berbenturan dengan UU profesi dokter, perlu kembali ditegaskan batasannya. Dalam kondisi apa para bidan boleh mengambil tindakan medik. Yang jelas RUU ini jadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan layanan kesehatan kepada masyarakat. ■



Ketua BKSAP Nurhayati Ali Assegaf bersama peneliti dari ERIA

kemudian juga pengawasan," ungkap Nurhayati di ruang kerjanya, Kamis (2/6).

Menurut penjelasannya Nurhayati, ERIA merupakan lembaga penelitian khusus untuk negara-negara di ASEAN. Lembaga ini berkantor di Jakarta, yang saat ini sedang menggarap penelitian tentang sustainable di Indonesia.

harus ditempuh," paparnya.

Nurhayati juga menerangkan, DPR RI lewat BKSAP, sejak 2010 sudah membuat Panitia Kerja Melinium Development Goals, yang saat ini berganti Panitia Kerja menjadi Sustainable Development Goals. ■

(ed), foto: Rumi/hr

(mb), foto: Juan Armanita/hr

## Komisi IX Undang IBI,POGI dan IDAI Himpun Masukan RUU Kebidanan

Komisi IX DPR menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan Ikatan Bidan Indonesia, Persatuan Obstetrik Ginekologi Indonesia dan Ikatan Dokter Anak Indonesia. Rapat ini guna mendapatkan masukan terkait Rancangan Undang-Undang tentang Kebidanan.

“ Kami butuh masukan dan informasi mengenai permasalahan apa saja yang terjadi di lapangan, hal ini penting untuk merancang RUU Kebidanan, karena dari permasalahan itu akan diatur dengan UU,” ujar Wakil Ketua Komisi IX, Asman Abnur (F-PAN) saat memimpin rapat di Gedung Nusantara I, Komplek DPR, Kamis (2/6).

Dikatakannya, RUU Kebidanan ini dibuat untuk melindungi bidan dan memberi manfaat bagi masyarakat. Komisi IX perlu masukan agar Undang-Undang yang dilahirkan nanti betul-betul menjadi solusi yang komprehensif dari semua masalah yang ada saat ini.

"Kami betul-betul mengharapkan masukan agar kualitas bidan meningkat dan dapat mengurangi angka kematian ibu dan anak dengan kelahiran UU ini. Apa saja yang perlu dimasukkan kedalam UU kami butuh itu semua agar UU ini



Wakil Ketua Komisi IX Asman Abnur berdialog dengan sejumlah mitra kesehatan Pemerintah

nantinya menjadi solusi,"katanya.

Hal senada disampaikan oleh Anggota Komis IX, Marwan Dasopang dengan berharap pertemuan ini khususnya IBI dapat memunculkan pasal mengenai apa saja yang membahayakan bidan, sehingga dapat membuat rasa nyaman bagi bidan dalam melakukan tugas. Bagi masyarakat tentunya terlindungi dan merasa nyaman dilayani bidan.

Anggota Komisi IX DPR, Irma Suryani Chaniago berharap RUU yang sedang digodog Komisi IX menjadi solusi bagi para bidan di Indonesia. Agar menjadi UU yang komprehensif, perlu informasi dari berbagai elemen terkait pelayanan kebidanan ini.

"Masih perlu banyak waktu, kita minta masukan secara detail supaya kita nanti tidak lagi bicara kuantitas UU tapi kita mengejar kualitas. Selama ini DPR kalau bikin UU kualitasnya belakangan, yang penting UU diselesaikan. Setelah itu *judicial review* di MK. Ini kita tidak mau, kita mau UU ini betul-betul menjadi solusi yang komprehensif," tekan dia.

Ketua IBI Emi Nurjismi menjelaskan yang harus dibenahi dalam hal ini adalah perlu diperhatikan kesejahteraan bidan, dukungan sarana prasarana yang memadai. Dengan diharapkan pemberi pelayanan menjadi lebih baik dengan fasilitas yang baik.

"Jadi bukan hanya penempatan di daerah tetapi diberikan fasilitas memadai. Karena tanpa rumah sakit yang baik, tanpa kendaraan yang baik, mereka tidak bisa memberikan pelayanan yang baik. Tenaga menjadi tidak bermanfaat, saya ingin ini dipikirkan," ujar Emi menambahkan. ■

(rmm,pp) Foto: jayadi/hr

## Komisi V Dorong Lion Air Perbaiki Layanan

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Yudi Widiana Adia, mengatakan bahwa penerbangan nasional saat ini sedang banyak disorot, dan salah satu yang paling banyak disorot adalah manajemen Lion Air.

Menurutnya, Komisi V melihat keberadaan maskapai Lion tersebut adalah sebagai aset bangsa yang memfasilitasi kebutuhan anak bangsa untuk terkoneksi dari satu tempat ke tempat lain.

"Kita juga paham bahwa banyak keluhan, tetapi kita harus memposisikan sama dengan maskapai lain yang juga merupakan aset bangsa. Harus kita arahkan dan harus kita monitor untuk kebaikan. Ketika ada problem maka kita luruskan, dan ketika ada nilai baik harus semakin

ditingkatkan lagi," ujar Yudi, disela-sela kunjungan kerja spesifik ke Kantor Lion Group, di Balaraja, Banten, Jum'at (3/6).

Tujuan kunjungan kerja spesifik Komisi V mendatangi kantor Lion Group adalah untuk melakukan peninjauan terhadap berbagai fasilitas di pusat operasi Lion, di wilayah Balaraja, Tangerang, Banten, ini untuk memastikan bahwa manajemen pengelolaan Lion itu profesional.

"Yang kami dapatkan setelah melakukan peninjauan langsung, ada



Wakil Ketua Komisi V DPR RI Yudi Widiana Adia

keseriusan yang dilakukan pihak Lion, dan kita berharap ada peningkatan-peningkatan ke arah yang lebih baik lagi. Komisi V juga memberikan motivasi kepada pihak Lion agar terus dapat exis, karena keberadaannya sudah dapat dirasakan oleh masyarakat," tandasnya. ■

(dep,pp) Foto: Naefurrij/hr

# Kebijakan Pemerintah Terkait Harga Daging Sapi Matikan Peternak

Kebijakan pemerintah terkait harga daging sapi Rp 80 ribu/kg, bisa mematikan 5,3 juta peternak di Indonesia. Sementara, harga pakan untuk per Kg daging sapi sudah mencapai Rp 45-an ribu. Oleh karena itu, jika kebijakan itu dipaksakan, berarti pemerintah memaksa peternak untuk mensubsidi orang kaya.

Hal tersebut ditegaskan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Daniel Johan dalam diskusi dialektika demokrasi dengan tema "Monopoli dan Stabilitas Harga Menjelang Ramadhan 1437 H" bersama Direktur Eksekutif INDEF Enny Sri Hartati dan Pengamat Ekonomi Politik Ichsanuddin Noorsy di Media Center Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (2/6).



Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Daniel Johan saat diskusi Dialektika Demokrasi

"Harga Rp 80 ribu/kg itu kalau daging beku dan tak mungkin laku di pasaran. Padahal, anggaran swasembada sapi mencapai Rp 210 triliun. Jadi, kalau kebijakan itu dipaksakan peternak akan rugi Rp 70 ribu/kg. Jadi, sebaiknya pemerintah melakukan kebijakan lintas menteri khusus untuk pangan ini," tegas politisi PKB itu.

Oleh karena itu, kata Daniel, jangan selalu menyebut mafia-kartel, kalau pemerintah terbukti tidak bisa mengendalikan harga. Padahal, pemerintah bisa membuat kebijakan dengan harga tertinggi di pasaran, dan siapa yang melanggar ketentuan itu bisa dijatuhi sanksi. Misalnya dilarang berjualan selama satu bulan dan sebagainya.

Hanya saja data jumlah kebutuhan daging dan impor sapi itu sendiri berbeda antar institusi pemerintah. Baik BPS, Bulog, dan Kementerian Pertanian. Karena itu perlu dibentuk Badan Pangan Nasional (BPN), dan Badan Urusan Logistik (Bulog) adalah paling tepat, karena sudah ada perwakilannya di seluruh Indonesia. "Jadi, Bulog harus menjadi stabilisator harga pangan di Indonesia," pungkasnya.

Menurut Enny Sri Hartati, masalah pangan itu tak sekedar harga murah, tapi juga ketersediaan, dan tak boleh tergantung

kepada negara lain. Kecuali hanya satu dua komoditas pangan saja. "Pada prinsipnya ketergantungan (impor) pangan itu tak boleh lebih dari 50%," tandasnya.

Kalau mahalnya daging itu terkait pakan yang mahal kata Enny, kenapa pemerintah tidak serius menangani industri pakan ternak, yang selama ini hanya dimonopoli oleh lima kartel industri. "Yang pasti sejak 2015, harga daging itu tetap naik, dan terus naik. Maka pemerintah harus ada koreksi atas komoditas daging untuk rakyat ini. Bahwa harga itu tergantung suplai, dan di suplai inilah ada peluang untuk permainan harga," jelas Enny.

Persoalannya mengapa hal itu dibiarkan? Gula misalnya kini naik Rp 5.000,- padahal, gula termasuk pangan yang bertahan lama. Telor naik Rp 4.000,- dan sebagainya. "Artinya pemerintah tidak mengantisipasi masalah yang terjadi setiap tahun ini," tutur Enny lagi.

Sementara itu, Ichsanuddin Noorsy menyayangkan data yang berbeda dari ketiga institusi pemerintah (BPS, Kementerian Pertanian, dan Bulog) tersebut. Sehingga hal itu akan terus menjadi permainan kelima kartel tersebut, dan kuncinya, hanya satu, yaitu menjadikan Bulog sebagai stabilisator harga pangan.

"Saya sejak tahun 2003 sudah mendesak agar pemerintah menjadikan Bulog sebagai stabilisator harga, berikut industri produksi pangan, badan pangan, dan pasar. Jadi, kalau Wantimpres rapat dan memutuskan harga daging sapi Rp 80 ribu/kg, maka satu-satunya jalan adalah impor, karena pemerintah tidak punya kebijakan yang antisipatif," tambahnya.

Dengan demikian kata Ichsanuddin, kalau masalah yang sama ini selalu gagal berulang-ulang, berarti ada birokrasi, pengusaha (kartel), dan parpol yang selalu bermain. "Masalah ini kan terjadi setiap tahun, kalau tidak mampu diselesaikan berarti ada permainan," katanya

Selain itu selama nilai tukar rupiah lemah, maka selama itu pula menurut Ichsanuddin, negara ini tak bisa melakukan stabilitas harga. Yang terjadi adalah pemiskinan struktural, karena kebijakan pemerintah tidak menyelesaikan secara struktural. "Jadi jangan teriak-teriak Trisakti dan Nawacita semu, selama negara ini pangan dan nilai tukar uangnya masih dipertainkan negara lain. Padahal Bank Indonesia (BI) itu tugasnya untuk mengantisipasi inflasi dan menstabilkan nilai rupiah. Kalau gagal, maka negara ini akan terus berhadapan dengan gejolak harga," ungkapnya.

Sementara kebijakan pemerintah yang salah kata Ichsanuddin, akan melahirkan kemiskinan dan kejahatan. "Politik boleh berganti, tapi pengusaha, dan bandar tidak berubah, maka pemerintah akan terus dikendalikan oleh bandar. Jadi, selama 15 tahun paska reformasi ini Indonesia tidak pernah mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta target pertumbuhan ekonomi selalu gagal," pungkasnya. ■

(s), foto : anand/br.



# BERITA BERGAMBAR



Tim Panja RUU TJSP Komisi VIII DPR dipimpin Wakil Ketua Komisi VIII DPR Deding Ishak melakukan pertemuan dengan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur beserta jajarannya, Kamis (2/6). Foto : Iwan/hr



Rapat Kerja Komisi VII DPR dengan Kementerian ESDM perihal pembentukan harga eceran tertinggi elpiji 3 kg dan seleksi calon anggota Komite BPH Migas di Ruang Rapat Komisi VII, Rabu (8/6). Foto : Jaka/hr



Deputi Administrasi Achmad Djuned didampingi Deputi Persidangan Damayanti audiensi dengan perwakilan tenaga ahli dan staf administrasi Anggota Dewan, Jumat (10/6) Foto : Azka/hr

Sampaikan aspirasi Anda melalui SMS ASPIRASI DPR RI di 08119443344



@dpr\_ri



DPR RI



@DPR\_RI



DPR RI